

PERAN BELANJA MODAL DAN BELANJA BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN DI INDONESIA

Raynal Yasni

Politeknik Keuangan Negara STAN
Email raynalyasni@pknstan.ac.id

Heri Yulianto

Direktorat Jenderal Anggaran

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dua instrumen kebijakan belanja pemerintah dalam mengatasi ketimpangan daerah yang diukur dengan indeks Theil. Penelitian ini menggunakan unit analisis kabupaten/kota yang ada di tiap provinsi sebagai objek. Data penelitian merupakan data sekunder yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan BPS dalam kurun waktu 2012 s.d. 2016 sehingga berbentuk data panel. Hasil penelitian menunjukkan belanja modal dan belanja bantuan sosial secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan provinsi di Indonesia. Sedangkan secara parsial, variabel rasio belanja modal pemerintah berpengaruh signifikan terhadap peningkatan ketimpangan Provinsi di Indonesia, sedangkan rasio belanja bantuan sosial berpengaruh tidak signifikan terhadap ketimpangan di Indonesia. Hasil penelitian ini turut menegaskan pentingnya bentuk kebijakan dibandingkan sekedar jumlah belanja yang harus dikeluarkan oleh pemerintah.

Kata kunci: bantuan sosial, belanja modal, ketimpangan, Theil

Abstract

This study aims to analyze two instruments of government spending in overcoming regional inequality as measured by Theil index. This study uses district and city in each province as objects of analysis. We use secondary data obtained from the Directorate General of Fiscal Balance and Statistics Indonesia in the period of 2012 to 2016 for panel data analysis. The results show that capital expenditure and social assistance expenditure altogether have a significant effect on the inequality of provinces in Indonesia. While partially, the ratio of government capital expenditure has a significant effect on increasing inequality of provinces in Indonesia, while the ratio of social assistance expenditure does not have significant effect on inequality in Indonesia. The results of this study also emphasize the importance of the policy rather than the amount of expenditure that must be spent by the government.

Keywords: social assistance expenditure, capital expenditure, inequality, Theil

1. PENDAHULUAN

Sebaran pendapatan penduduk di Indonesia masih menunjukkan ketimpangan (*inequality*) antar daerah. Setelah 75 tahun merdeka dengan berbagai program pembangunan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi memang berhasil diciptakan, tetapi diikuti dengan makin bertambahnya kesenjangan atau ketimpangan antar wilayah. Hal ini terlihat dari beberapa penelitian seperti Yusuf et al (2013), Miranti (2013), dan Chongvilaivan dan Kim (2015). Pada skala nasional, tingkat kesejahteraan antar wilayah

menjadi tidak berimbang dengan Jawa dan wilayah yang lebih dekat dengan ibukota Negara menikmati kapasitas pembangunan lebih besar. Pada tingkat propinsi, penggunaan investasi dan sumber daya banyak terserap dan terkonsentrasi di perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan, sementara wilayah-wilayah yang jauh dari perkotaan (*hinterland*) hanya menjadi tempat eksploitasi sumber daya yang berlebihan. Secara makro, dapat dilihat terjadinya ketimpangan antar wilayah yang signifikan antara desa-kota, antara Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan Kawasan Barat Indonesia (KBI), antara wilayah Jawa dan luar Jawa, dan termasuk antara pulau besar dan pulau kecil (Bappenas, 2013).

Kesenjangan perekonomian antar wilayah khususnya antara KBI dan KTI dapat digambarkan melalui distribusi nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (Bappenas, 2013). Distribusi nilai PDRB antara wilayah KBI dan KTI menunjukkan tingkat kesenjangan yang cukup tinggi. Data PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dari tahun 2012-2016 (Tabel 1) menunjukkan PDRB selama periode tersebut masih terkonsentrasi di Wilayah KBI (Jawa Bali dan Sumatera). Kontribusi PDRB dari wilayah tersebut tahun 2016 mencapai sekitar 82,06 persen terhadap perekonomian nasional, sementara untuk wilayah lainnya relatif rendah terutama wilayah KTI (Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua) hanya sebesar 4,04 persen.

Tabel 1. Distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per pulau

Wilayah	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
Kawasan Barat Indonesia (KBI)					
1. Sumatera	23,10%	23,05%	23,02%	22,18%	22,03%
2. Jawa, Bali	58,05%	58,46%	58,85%	59,86%	60,03%
Kawasan Timur Indonesia (KTI)					
1. Kalimantan	9,66%	9,25%	8,77%	8,15%	7,85%
2. Sulawesi	5,41%	5,50%	5,64%	5,91%	6,04%
3. Nusra, Maluku, Papua	3,78%	3,75%	3,72%	3,91%	4,04%

Sumber: BPS, 2017 diolah

Dengan timbulnya perbedaan kemampuan dalam pembangunan ekonomi, tidak heran jika terdapat kategori wilayah maju dan wilayah berkembang dari setiap daerah. Perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi geografi yang terdapat pada masing-masing wilayah juga menyebabkan ketimpangan daerah (Akita dan

Miyata, 2017). Ketimpangan ini membawa dampak terhadap kesejahteraan masyarakat antar wilayah tersebut.

Akita dan Miyata (2017) menyebut ada perbedaan aktifitas ekonomi dan ketersediaan infrastruktur di daerah sebagai penyebab ketimpangan. Dengan demikian, intervensi pemerintah dalam perekonomian yang bersifat masif dalam skala nasional sangat diperlukan, yang dilakukan dengan pengeluaran belanja modal dalam rangka pembangunan sarana dan prasarana infrastuktur.

Dibutuhkan juga pengeluaran berupa bantuan sosial untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan menggerakkan aktifitas ekonomi serta mencegah terjadinya risiko sosial sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD. Berdasarkan data alokasi APBD dari DJPK, secara akumulatif total alokasi belanja bantuan sosial pemerintah daerah pada tahun 2016 sebesar Rp.7,306 triliun, naik dibandingkan alokasi tahun 2015 sebesar Rp.5,706 triliun. Pengalokasian belanja bantuan sosial ini diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan serta ketimpangan pendapatan di daerah tersebut.

Beberapa penelitian sebelumnya sangat banyak menganalisis masalah ketimpangan dan memberikan saran kebijakan untuk mengatasinya. Penelitian ini menjadi berbeda karena fokus pada dua instrumen kebijakan belanja pemerintah dalam mengatasi ketimpangan daerah dengan melihat ketimpangan yang diukur menggunakan indeks Theil. Peran belanja modal dan belanja bantuan sosial oleh Pemerintah Daerah ini adalah untuk mengatasi ketimpangan pendapatan antar provinsi yang diharapkan semakin berkurang.

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada belanja modal dan belanja bantuan sosial oleh pemerintah kabupaten/kota dalam suatu provinsi dan seberapa besar pengaruhnya pada pendapatan masyarakat dalam provinsi dengan periode pengamatan data panel selama tahun 2012-2016. Sebelum rentang periode penelitian tersebut yakni di tahun 2011, Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang efektif dilaksanakan untuk periode penyusunan APBD tahun 2012. Periode penelitian ini juga dipilih karena mewakili periode pemerintahan dua Kepala Negara berbeda dengan fokus kebijakan

pembangunan yang berbeda termasuk masa transisinya. Pada periode ini, mulai tahun 2015, dana desa memang sudah diberikan kepada sekitar 74.000 desa, namun proses alokasi dana yang dilakukan belum mencapai alokasi penuh sebesar 1 miliar untuk tiap desa serta peruntukannya masih belum fokus pada penyediaan infrastruktur. Dengan demikian, masih tepat bila periode ini digunakan untuk melihat kontribusi belanja modal dan bantuan sosial kabupaten/kota terhadap ketimpangan antar provinsi.

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi positif bagi sisi akademis, masyarakat, dan Pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Beberapa manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

- a. Memberikan informasi dan saran bagi pemerintah untuk dapat melihat lebih detail faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan di Indonesia, sehingga pengambilan kebijakan pemerintah selanjutnya lebih tepat dalam mengatasi ketimpangan.
- b. Menjadi *building block of science* dengan cara melengkapi kajian mengenai ketimpangan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya untuk dapat menjadi salah satu referensi bagi peneliti lain terkait isu ketimpangan dan belanja pemerintah.

2. TINJAUAN PUSTAKA

a. Distribusi Pendapatan, Pertumbuhan, dan Ketimpangan

Distribusi pendapatan adalah konsep yang lebih luas dibandingkan analisis kemiskinan. Cakupan permasalahan ini tidak hanya mengenai populasi yang berada di bawah garis kemiskinan, melainkan ketidakmerataan pendapatan antar kelompok masyarakat dalam suatu daerah. Ketidakmerataan inilah yang kerap didefinisikan sebagai ketimpangan (*inequality*) dalam distribusi pendapatan (Wibowo, 2017). Terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan, antara lain rasio Gini, indeks Williamson, dan Indeks Theil.

Penelitian ini akan menggunakan alat ukur ketimpangan berupa indeks Theil. Indeks Theil dapat membantu mengetahui ketimpangan kabupaten/kota dan penyebab dominan terjadinya ketimpangan. Karakteristik utama dari indeks *Theil entropy* ini adalah kemampuannya untuk membedakan ketimpangan antar wilayah (*between-region inequality*) dan ketimpangan dalam suatu wilayah (*within-region inequality*) (Kuncoro, 2002). Indeks Theil memiliki kelebihan dibanding indeks ketimpangan lain karena

memenuhi semua kriteria indeks yang dipersyaratkan yaitu bisa didekomposisi, *mean independence*, *population independence*, dan memenuhi prinsip pengalihan Pigue-Dalton (Akita dan Miyata, 2017).

Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah dapat terlihat dari bertambahnya sumber daya baik sumber daya modal maupun tenaga kerja (Arnold, 2014: 47). Pertumbuhan ekonomi regional yang diukur dengan PDRB dapat dihubungkan juga dengan naiknya pendapatan masyarakat di suatu daerah secara keseluruhan. Menurut Kuznets (1955) terdapat hubungan antara tingkat pendapatan dan distribusi pendapatan yang berbentuk U terbalik. Menurut konsep Kuznets ini, pada awal proses pembangunan, ketimpangan distribusi pendapatan meningkat karena proses urbanisasi dan industrialisasi. Pada akhir proses pembangunan, ketimpangan pendapatan mengalami penurunan, yaitu pada saat sektor-sektor ekonomi di daerah perkotaan sudah mampu menyerap sebagian besar tenaga kerja yang berasal dari pedesaan.

Beragam kesimpulan terkait ketimpangan pendapatan dan efeknya bagi perekonomian juga terlihat pada studi berikut. Ada yang menyatakan bahwa ketimpangan mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi ada juga yang mengatakan sebaliknya. Hasil penelitian Deininger dan Squire (1996) tidak menunjukkan adanya suatu relasi yang jelas antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan. Walaupun hipotesis itu diterima, sebagian besar dapat dibuktikan bahwa hubungan negatif antara pertumbuhan dan ketimpangan dalam jangka panjang hanya terjadi pada kelompok negara-negara industri maju. Hasil penelitian Wahyuni (2004) menemukan adanya hubungan yang negatif antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan, namun ia juga meragukan bahwa bisa saja keduanya tidak berhubungan. Sementara itu, Benabou (1996) juga Barro (2000) menyimpulkan bahwa belum jelas terlihat apakah hubungan pertumbuhan dan ketimpangan adalah positif, negatif, atau bukan keduanya.

Studi lain dengan pendekatan analisis deret waktu oleh Ravallion dan Datt (1996) menemukan bahwa di India selama periode 1950-1990 pendapatan rata-rata per kapita meningkat, namun di sisi lain ketimpangan pendapatan mengalami penurunan. Berikutnya, Waluyo (2004) meneliti hubungan antara tingkat ketimpangan distribusi pendapatan dengan pertumbuhan ekonomi di beberapa negara. Kesimpulan penelitian

tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif dan signifikan antara distribusi pendapatan dengan pertumbuhan ekonomi.

b. Peran Pemerintah dalam Perekonomian

Peran pemerintah dalam perekonomian telah lama menjadi objek pembahasan yang menarik di antara ahli ekonomi. Bila mekanisme pasar telah bekerja secara efisien, tidak ada alasan seharusnya bagi pemerintah untuk melakukan intervensi di pasar (Gruber, 2011). Sebaliknya, Keynesian menganggap bahwa kebebasan pasar, tanpa ada campur tangan pemerintah, tidak akan mampu melakukan alokasi sumber daya dan output secara optimal (*full employment of outputs*). Karena itu, Musgrave dan Musgrave (2007) memandang perlu adanya peran pemerintah, antara lain dalam bentuk kebijakan anggaran untuk mengatasi pengangguran yang sekaligus juga meningkatkan daya beli dan mendorong adanya kegiatan bisnis.

Dalam perekonomian, pemerintah memiliki peran stabilisasi, peran alokasi, dan distribusi (Musgrave dan Musgrave, 2007). Dengan menyalurkan belanja modal dan bantuan sosial, pemerintah telah menerapkan fungsi alokasi dan distribusi ini. Sjafrizal (2008) menyatakan bahwa dalam mengatasi ketimpangan pembangunan dapat dilakukan dengan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan, mendorong transmigrasi dan migrasi spontan, pembangunan pusat-pusat pertumbuhan yang baru di daerah yang berskala kecil, dan kebijakan fiskal wilayah yang mendukung penyelesaian masalah ketimpangan. Hal ini juga didukung oleh Heryanah (2013) bahwa pada tahun 2013 kesenjangan intra provinsi menyumbang 89 persen terhadap kesenjangan nasional, sehingga sangat penting mengedepankan program-program pemerataan pembangunan antar daerah di dalam provinsi.

c. Hasil Penelitian Sebelumnya

Terdapat beberapa penelitian mengenai ketimpangan yang telah dilakukan dan kajian yang mengkaitkan dengan belanja pemerintah termasuk cukup banyak dilakukan, antara lain Rutkowski (2009), Wajdi (2011), Putra (2016), dan Andhiani et al (2018). Secara umum, belanja bantuan sosial pemerintah menjadi target analisis dalam studi

tentang ketimpangan oleh peneliti tersebut karena dianggap dapat berdampak langsung bagi pendapatan masyarakat.

Di sisi lain, analisis ketimpangan juga dikaitkan dengan proses desentralisasi yang berlangsung di beberapa Negara termasuk Indonesia. Bonet (2006) berpendapat ketimpangan di Kolombia meningkat akibat desentralisasi. Sementara itu, Akita dan Miyata (2017) mendapati ketimpangan Indonesia malah meningkat pasca desentralisasi diberlakukan. Demikian juga dengan penelitian dari Yusuf, Sumner, dan Rum (2013), meski tidak menunjuk langsung pada proses desentralisasi, ketimpangan Indonesia mengalami peningkatan setelah terjadinya krisis ekonomi di tahun 1998.

Di samping hal-hal di atas, beberapa penulis banyak juga menggunakan indikator makro untuk mengukur ketimpangan yaitu pendapatan daerah, IPM, dan PDRB meski dengan hasil yang berbeda. Nurhuda, Muluk, dan Prasetyo (2013) menemukan bahwa PAD dan IPM berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pembangunan di Jawa Timur. Sebaliknya, Pranajaya (2016) menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan IPM berpengaruh signifikan dan positif pada ketimpangan khususnya di area Jawa, Bali dan Nusa Tenggara.

d. Hipotesis dan Kerangka Pemikiran Penelitian

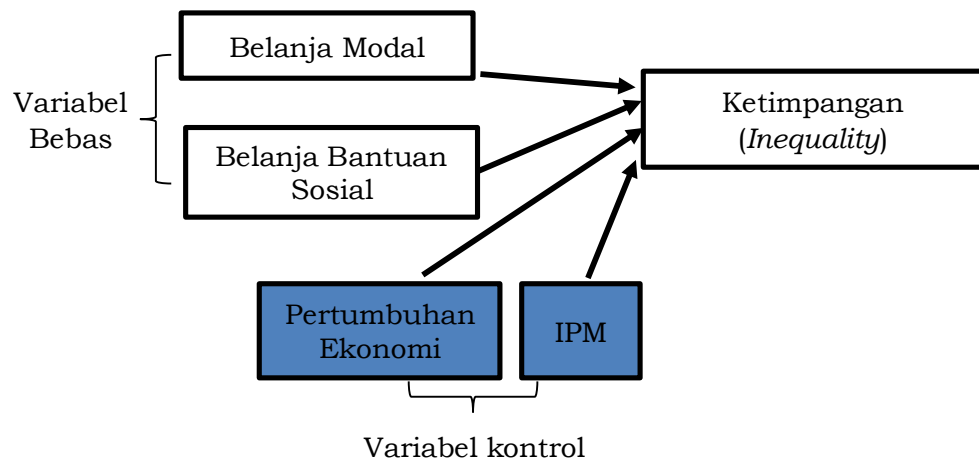
Berdasarkan landasan teori dan hasil dari penelitian sebelumnya, khususnya Wajdi (2011), dan untuk melihat hubungan dua kebijakan belanja pemerintah yang mempengaruhi perekonomian yaitu belanja modal dan belanja bantuan sosial, diusulkan hipotesis sebagai berikut:

- H₁ = Rasio Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap Ketimpangan
- H₂ = Rasio Belanja Bantuan Sosial berpengaruh signifikan terhadap Ketimpangan
- H₃ = Rasio Belanja Modal dan Rasio Belanja Bantuan Sosial secara bersama-sama berpengaruh terhadap ketimpangan

Belanja modal dan belanja bantuan sosial dalam penelitian ini menggunakan nilai rasio sebagaimana dalam penelitian Wajdi (2011), namun dapat dibedakan dalam periode yang dipilih serta menggunakan data kabupaten/kota secara nasional. Dalam hal pemilihan kontrol, digunakan IPM dan pertumbuhan ekonomi sebagaimana digunakan dalam penelitian Wajdi (2011), Putra (2016), Pranajaya (2016), Andhiani et al (2018), dan

Nurhuda et al (2013). Adapun kerangka pemikiran penelitian ini digambarkan dalam gambar 1.

Gambar1. Kerangka Pemikiran Penelitian



Sumber: Diolah penulis

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan unit analisis kabupaten/kota yang ada di tiap provinsi sebagai objek. Di tahun 2012, provinsi Kalimantan Utara dibentuk sebagai pemekaran dari provinsi Kalimantan Timur. Karena provinsi tersebut baru terbentuk dan masih terbatasnya data Provinsi baru ini di awal periode pembentukannya, provinsi yang memenuhi variabel penelitian untuk periode 2012-2016 hanya 33 provinsi dengan data panel selama 5 tahun.

Data penelitian berbentuk data sekunder yang diperoleh dari DJPK dan BPS dalam kurun waktu 2012 s.d. 2016, berupa laporan realisasi anggaran Pemerintah Daerah serta publikasi dan data PDRB kabupaten/kota, jumlah penduduk, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS). Data sekunder ini diperoleh dari www.bps.go.id, www.djpk.depkeu.go.id serta dari sumber-sumber lainnya yang relevan.

Terdapat dua variabel bebas dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Rasio Belanja Modal
- 2) Rasio Belanja Bantuan Sosial.

Rasio belanja modal penelitian ini merupakan perbandingan antara realisasi total belanja modal kabupaten/kota dalam satu provinsi dengan total realisasi belanja kabupaten/kota dalam provinsi tersebut. Sedangkan, rasio belanja bantuan sosial merupakan perbandingan antara realisasi total belanja bantuan sosial kabupaten/kota dalam satu provinsi dengan total realisasi belanja kabupaten/kota dalam provinsi tersebut.

Variabel terikat penelitian adalah ketimpangan yang akan diukur dengan menggunakan indeks Theil. Indeks Theil yang dihitung merupakan indeks Theil tingkat provinsi, sehingga data yang digunakan dalam perhitungan adalah PDRB per kapita kabupaten/kota dan jumlah penduduk kabupaten/kota dalam rentang waktu 2012-2016.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa variabel kontrol dalam model sebagaimana berangkat dari penelitian Wajdi (2011). Terdapat dua variabel kontrol yang digunakan, yakni pertumbuhan ekonomi provinsi menggunakan PDRB dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM menggambarkan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM dibentuk dari tiga dimensi dasar, yakni umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak.

Berdasarkan hipotesis yang dibangun dalam landasan teori dan variabel-variabel yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis mengusulkan model penelitian sebagai berikut:

Persamaan

$$INEQ_{i,t} = \alpha_{0\ i,t} + \beta_1 PE_{i,t} + \beta_2 RBM_{i,t} + \beta_3 RBS_{i,t} + \beta_4 IPM_{i,t} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

INEQ _{i,t}	= Ketimpangan provinsi berdasarkan Indeks Theil
PE _{i,t}	= Pertumbuhan ekonomi provinsi i periode ke-t
RBM _{i,t}	= Rasio Belanja Modal provinsi i periode ke-t
RBS _{i,t}	= Rasio Belanja Bantuan Sosial provinsi i periode ke-t
IPM _{i,t}	= Nilai Indeks Pembangunan Manusia provinsi i periode ke-t
α	= Konstanta
β ₁ , β ₂ , β ₃ , β ₄	= Koefisien Regresi/ Slope
ε	= Error
i	= Jumlah <i>cross section</i> terdiri dari 33 provinsi di Indonesia

t = Menunjukkan periode waktu yaitu dari tahun 2012 – 2016

Statistik deskriptif selanjutnya akan ditampilkan untuk menggambarkan data yang telah dikumpulkan tanpa bermaksud membuat suatu kesimpulan dari data tersebut (Sugiyono, 2010). Teknik statistik deskriptif yang digunakan di antaranya adalah penyajian data melalui tabel, grafik, dan perhitungan penyebaran data melalui perhitungan rata-rata dan standar deviasi, serta perhitungan persentase (Sugiyono, 2010).

Langkah berikutnya, penulis akan melakukan uji Chow, uji *Breusch and Pagan lagrangian multiplier*, dan uji Hausman untuk menentukan apakah penulis akan menggunakan metode *Ordinary Least Square, fixed effect*, atau *random effect* sebagai analisis regresi. Apabila data tidak lulus uji asumsi klasik, penulis akan mencoba prosedur regresi lainnya atau tetap meneruskan menggunakan *Ordinary Least Square, fixed effect*, atau *random effect* karena data panel memiliki keunggulan berupa sifat *robust* terhadap beberapa tipe pelanggaran asumsi Gauss Markov yaitu heteroskedasitas dan normalitas (Wooldridge, 2012). Program yang digunakan untuk pengujian statistik menggunakan aplikasi *Eviews 9*.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Analisis Deskriptif

Berdasarkan perhitungan Indeks Theil provinsi tahun 2012-2016 pada tabel 2, Provinsi Kepulauan Riau merupakan provinsi dengan ketimpangan tertinggi dengan rata-rata tahun 2012-2016 sebesar 0,4694. Sedangkan provinsi dengan rata-rata Indeks Theil terendah adalah provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan rata-rata Indeks Theil sebesar 0,0893.

Tabel 2. Provinsi dengan rata-rata Indeks Theil tertinggi dan terendah

Provinsi		Rata-rata Indeks Theil 2012-2016
Tertinggi	Kep. Riau	0.4694
Terendah	Kep. Bangka Belitung	0.0893

Sumber: BPS, diolah sendiri

Dari 33 provinsi yang menjadi objek penelitian, provinsi Kalimantan Timur merupakan provinsi dengan rata-rata rasio belanja modal tertinggi di Indonesia tahun 2012-2016, yakni sebesar 34,9%. Sedangkan provinsi dengan rata-rata rasio belanja modal terendah adalah provinsi DI Yogyakarta sebesar 15,3% dari total belanja daerah (lihat tabel 3).

Tabel 3. Provinsi dengan rata-rata rasio belanja modal tertinggi dan terendah

Provinsi	Rata-rata Rasio Belanja Modal 2012-2016
Kalimantan Timur	34.9
Papua Barat	31.0
Kalimantan Tengah	30.1
Jawa Tengah	16.4
Bali	16.3
DI Yogyakarta	15.3

Sumber: LKPD dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, diolah sendiri

Provinsi Papua merupakan provinsi dengan rata-rata rasio belanja bantuan sosial tertinggi di Indonesia tahun 2012-2016, yakni sebesar 3,25%. Sebaliknya, provinsi dengan rata-rata rasio belanja bantuan sosial terendah adalah provinsi Sumatera Selatan sebesar 0,1% dari total belanja daerah (lihat tabel 4).

Tabel 4. Provinsi dengan rata-rata rasio belanja bantuan sosial tertinggi dan terendah

Provinsi	Rata-rata Rasio Belanja Bantuan Sosial 2012-2016
Papua	3.2520
DKI Jakarta	2.9260
Papua Barat	2.8600
Sulawesi Tenggara	0.2320
Kalimantan Barat	0.2240
Sumatera Selatan	0.1040

Sumber: LKPD dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, diolah sendiri

Variabel indeks Theil provinsi di Indonesia selama tahun 2012-2016 memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,1687 serta nilai tengah sebesar 0,1172. Dari nilai indeks Theil tersebut terlihat terdapat provinsi yang sangat besar ketimpangan wilayahnya dan terdapat provinsi yang cukup merata perkembangan ekonominya. Nilai standar deviasi

sebesar 0,1425 menandakan terdapat perbedaan indeks Theil yang cukup besar antara provinsi yang ada di Indonesia pada periode 2012-2016 (tabel 5).

Rasio belanja modal (RBM) provinsi di Indonesia dalam periode 2012-2016 memiliki rata-rata sebesar 23,6% dari total belanja daerah serta nilai tengah sebesar 22,7%. Berdasarkan rasio belanja modal terdapat perbedaan yang cukup besar dimana Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2013 menjadi provinsi dengan rasio belanja modal terbesar yakni 41,7%. Sementara itu provinsi DI Yogyakarta pada tahun 2012 menjadi provinsi dengan rasio belanja modal terendah yakni sebesar 12,2% dari total belanja daerahnya. Besarnya perbedaan rasio belanja modal ini didukung dengan nilai standar deviasi RBM sebesar 5,24, yang menunjukkan perbedaan rasio belanja modal yang cukup signifikan antara provinsi di Indonesia tahun 2012-2016.

Rasio belanja bantuan sosial (RBS) provinsi di Indonesia pada tahun 2012-2016 memiliki nilai rata-rata sebesar 0,95% dari total belanja daerah dengan nilai tengah sebesar 0,52%. Berdasarkan rasio ini, provinsi DKI Jakarta pada tahun 2016 menjadi provinsi dengan rasio belanja bantuan sosial terbesar yakni 5,2%. Selanjutnya rasio belanja bantuan sosial terkecil sebesar 0,04% dari total belanja daerah dimiliki oleh provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2015 dan provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2016. Nilai standar deviasi RBS sebesar 1,09 menunjukkan perbedaan rasio belanja bantuan sosial antar provinsi di Indonesia cukup signifikan dalam kurun waktu 2012-2016.

Tabel 5. Analisis Statistik Deskriptif

Statistik	Indeks Theil	RBM	RBS
<i>Mean</i>	0.1687	23.6095	0.9479
<i>Median</i>	0.1172	22.7300	0.5200
<i>Maximum</i>	0.5892	41.6800	5.2000
<i>Minimum</i>	0.0299	12.1500	0.0400
<i>Std. Dev.</i>	0.1425	5.2414	1.0886
<i>Observations</i>	165	165	165

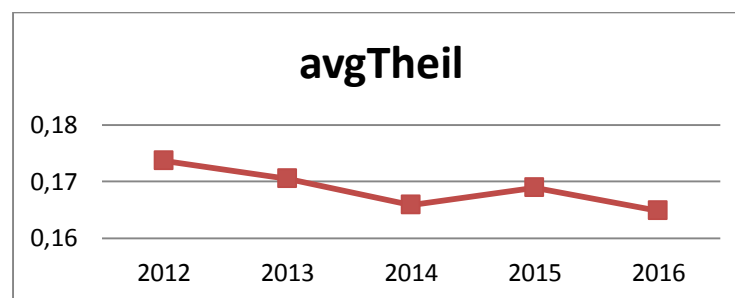
Sumber: BPS dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, diolah sendiri

Gambar 2 menjelaskan mengenai nilai rata-rata indeks Theil provinsi di Indonesia tahun 2012-2016. Dalam grafik tersebut ketimpangan provinsi di Indonesia secara rata-rata terus menurun, kecuali pada tahun 2015 dimana nilai rata-rata indeks Theil

meningkat dari sebesar 0,165 pada tahun 2014 menjadi sebesar 0,168 pada tahun 2015. Pada tahun 2016, nilai rata-rata indeks Theil kembali turun menjadi 0,164.

Berdasarkan rata-rata tahunan, variabel RBM, RBS dan Pertumbuhan Ekonomi (PE) mengalami penurunan dalam kurun waktu 2012-2016. Penurunan terbesar adalah variabel RBS yang pada tahun 2012 sebesar 1,05%, namun pada tahun 2016 rata-rata tahunannya turun menjadi sebesar 0,62.

Gambar 2. Rata-rata variabel Indeks Theil



Sumber: BPS, diolah sendiri

Sementara itu, IPM semua provinsi dalam periode 2012-2016 mengalami tren meningkat. Namun demikian, Papua dan Papua Barat masih menjadi provinsi dengan IPM terendah di Indonesia. Sementara IPM tertinggi, diraih oleh provinsi yang lazim memiliki PAD tinggi yakni DKI Jakarta, DIY, Kaltim, dan Kepri.

b. Analisis Statistik Inferensial

1) Penentuan Model Estimasi Regresi Data Panel

Dalam penentuan model persamaan penelitian, penulis melakukan regresi dalam dua model persamaan penelitian, yakni model persamaan dengan menggunakan variabel kontrol berupa pertumbuhan ekonomi (PE) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta regresi dengan model persamaan penelitian tanpa melibatkan variabel kontrol tersebut. Dalam tabel 6 berdasarkan hasil regresi menunjukkan bahwa model persamaan dengan menggunakan variabel kontrol memiliki nilai R^2 dan DW yang lebih baik dibandingkan dengan hasil regresi tanpa adanya variabel kontrol baik dengan menggunakan pendekatan *Common/Pooled Least Square* (PLS), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM). Dengan demikian dalam pembahasan selanjutnya, model persamaan penelitian yang digunakan adalah model persamaan penelitian dengan menggunakan variabel kontrol.

Selanjutnya dalam tabel 6, hasil regresi model persamaan dengan variabel kontrol dengan pendekatan FEM mempunyai nilai R^2 paling tinggi, yakni sebesar 0,9825. Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan, model regresi dengan pendekatan FEM dapat menjelaskan dengan lebih baik hubungan antar variabel bebas dan variabel terikatnya.

Tabel 6. Perbandingan Koefisien Determinasi (R^2) dan Durbin Watson (DW)

Model Persamaan	Tanpa Variabel Kontrol		Dengan Variabel Kontrol	
	Nilai R^2	Nilai DW	Nilai R^2	Nilai DW
<i>Common/Pooled Least Square (PLS)</i>	0,240499	0,212471	0,280796	0,234920
<i>Fixed Effect Model (FEM)</i>	0,979833	1,416323	0,982528	1,465802
<i>Random Effect Model (REM)</i>	0,011262	1,048076	0,108195	1,079255

Sumber: diolah dari reviews 9

a) *Likelihood Ratio Test (Chow Test)*

Likelihood Ratio Test atau *Chow test* digunakan untuk menentukan pemilihan model regresi yang lebih baik antara model FEM atau model PLS. Hasil *Chow Test* dapat dilihat pada Tabel 7. Pengujian terhadap persamaan penelitian menghasilkan p -value pada *Cross-section Chi-square* sebesar 0,0000 yang berarti signifikan terhadap α sebesar 5% (p -value < α) sehingga model penelitian yang dipilih adalah menggunakan pendekatan FEM dalam melakukan pengujian regresi.

Tabel 7. Hasil Pengujian Signifikansi Model

Metode Pengujian	Hasil
<i>Likelihood Ratio Test (Chow Test)</i>	<i>Prob. Cross-section Chi-square</i> = 0,0000 (model FEM)
<i>Hausman Test</i>	<i>Prob. Cross-section Random</i> = 0,0011 (model FEM)
<i>Lagrange Multiplier Test</i>	Breusch-Pagan Value (both) = 0,0000
Simpulan	Metode FEM

Sumber: diolah dari reviews 9

b) *Hausman Test*

Hausman Test digunakan untuk memilih model regresi yang lebih baik antara pendekatan REM atau pendekatan FEM. Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 7,

persamaan penelitian setelah dilakukan pengujian didapatkan nilai p -value pada *Cross-section Random* sebesar 0,0011. Nilai ini signifikan terhadap α sebesar 5% (p -value < α) sehingga model persamaan penelitian juga lebih tepat menggunakan pendekatan FEM dalam melakukan pengujian regresi.

Dari pengujian yang telah dilakukan di atas, dua metode mendapatkan hasil bahwa model pendekatan FEM lebih sesuai untuk digunakan dalam melakukan regresi, sementara satu metode pengujian lain, dengan menggunakan *Lagrange Multiplier* menghasilkan pendekatan REM lebih sesuai digunakan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa model pendekatan FEM yang akan digunakan dalam model penelitian. Selanjutnya dikarenakan model pengujian FEM merupakan pengujian berbasis *Ordinary Least Square* (OLS), maka perlu adanya beberapa pengujian asumsi klasik yang harus dipenuhi.

2) Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik dilakukan untuk memenuhi persyaratan *best linear unbiased estimator* (BLUE). Terdapat empat hasil pengujian asumsi klasik yang akan dipaparkan di bawah ini.

a) Uji Multikolinearitas

Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel 8. Berdasarkan tabel tersebut, tidak didapatkan adanya variabel independen yang memiliki korelasi lebih dari 0,85, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat permasalahan multikolinearitas pada model persamaan penelitian.

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas

	PE	RBM	RBS	IPM
PE	1.0000	- 0.2403	0.0251	- 0.1584
RBM	- 0.2403	1.0000	0.0019	- 0.1624
RBS	0.0251	0.0019	1.0000	- 0.0820
IPM	- 0.1584	- 0.1624	- 0.0820	1.0000

Sumber: diolah dari eviews 9

b) Uji autokorelasi

Uji autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan uji *Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test*. Hasil *Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test* dapat dilihat bahwa nilai *Prob. Chi-Square* adalah 0,000, dimana nilai tersebut signifikan terhadap α sebesar

5% ($p\text{-value} < \alpha$). Berdasarkan hasil ini, dapat dinyatakan bahwa terdapat masalah autokorelasi di dalam model penelitian. Nachrowi (2006) menjelaskan bahwa dalam model *fixed effect*, sulit dipenuhi asumsi terbebasnya model dari masalah autokorelasi, sehingga uji tentang autokorelasi dapat diabaikan. Widarjono (2013) menjelaskan bahwa penyembuhan autokorelasi dapat dilakukan dengan transformasi persamaan yang dikenal sebagai metode *generalized difference equation*. Pada dasarnya metode penyembuhan ini dilakukan dengan mengubah pendekatan regresi yang sebelumnya menggunakan *ordinary least squared* (OLS) menjadi *generalized least square* (GLS). Penyembuhan dengan cara ini dapat langsung dilakukan pada aplikasi Eviews 9 saat meregresi data.

c) Uji Heteroskedastisitas

Dengan menggunakan Eviews 9, peneliti melakukan semua pengujian formal (Uji Glejser, Uji Breusch-Pagan/Godfrey, Uji White, Uji ARCH, atau Uji Harvey) untuk menentukan ada tidaknya heteroskedastisitas. Hasil pengujian diperoleh nilai *Prob. Chi-Square* sebesar 0,0000. Hasil ini menunjukkan bahwa terdapat masalah heteroskedastisitas dalam model persamaan yang digunakan.

Masalah heteroskedastisitas seperti ini bisa terjadi secara alami pada variabel-variabel ekonomi. Dalam kasus penelitian ini, peneliti menemukan adanya provinsi dengan nilai indeks Theil yang sangat berbeda, padahal provinsi tersebut tersebut memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi, rasio belanja modal, rasio belanja bantuan sosial yang hampir sama. Masalah ini dapat diatasi dengan eviews 9, yakni dengan metode *white period* saat melakukan regresi.

3) Uji Hipotesis

a) Uji koefisien determinasi (*adjusted R²*)

Nilai koefisien determinasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai yang disesuaikan (*Adjusted R²*). Hasil uji determinasi dapat dilihat pada Tabel 9. Pada model persamaan diperoleh nilai *Adjusted R²* sebesar 99,8%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel independen (rasio belanja modal dan rasio belanja bantuan sosial) dalam model dapat menjelaskan sebanyak 99,8% terhadap variasi variabel dependen (ketimpangan). Sementara 0,02% variasi variabel dependen dijelaskan oleh variabel independen lainnya yang tidak dijelaskan dalam model persamaan penelitian.

b) Pengujian model secara simultan (Uji F)

Hasil Uji F yang dapat dilihat pada tabel 9. Hasil regresi model persamaan diperoleh nilai probabilitas F-stat sebesar 0,00000. Nilai tersebut signifikan terhadap α ($p\text{ value} < 5\%$), sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel independen (rasio belanja modal dan rasio belanja bantuan sosial) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel ketimpangan.

Tabel 9. Hasil Regresi Data Panel

<i>Variabel</i>	<i>Coeffiicient</i>	<i>Prob</i>	<i>Keterangan (a 5%)</i>
PE	0,000901	0,0034	Signifikan
IPM	-0,001216	0,0175	Signifikan
RBM	0,000519	0,0155	Signifikan
RBS	0,000487	0,6808	Tidak signifikan
C	0,140793	0,0000	
<i>Adjusted R²</i>	0,998150		
<i>Prob F Stat</i>	0,00000		

Sumber: diolah dari Eviews 9

c) Pengujian model secara parsial (Uji t)

Hasil uji *t-stat* pada tabel 9 dengan α 5% menunjukkan uji regresi variabel independen yakni RBM memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen (ketimpangan) dengan koefisien bernilai positif. Sedangkan variabel independen RBS memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap variabel dependen ketimpangan.

4) Interpretasi Hasil

Berdasarkan hasil uji estimasi data panel model persamaan dengan menggunakan pendekatan FEM disajikan sebagai berikut:

$$INEQ_{i,t} = 0,229281 + 0,000901PE_{i,t} + 0,000519RBM_{i,t} + 0,000487RBS_{i,t} - 0,001216IPM_{i,t}$$

Model di atas dapat diinterpretasikan sebagaimana penjelasan di bawah ini.

a) Pengaruh rasio belanja modal (RBM) terhadap ketimpangan

Koefisien variabel RBM pada hasil regresi model persamaan sebesar 0,000519 dengan probabilitas sebesar 0,0155. Dari nilai tersebut dapat dijelaskan bahwa dengan kenaikan RBM sebesar 1%, akan menyebabkan kenaikan ketimpangan sebesar 0,000519%, dengan asumsi tidak ada perubahan pada variabel lain (*ceteris paribus*).

Hasil Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sabir (2015) di Provinsi Sulawesi Selatan, dimana hasil kesimpulannya menyatakan bahwa alokasi belanja modal pada APBD berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian oleh Wajdi (2011) yang menyatakan bahwa angka ketimpangan meningkat disebabkan Rasio Belanja Infrastruktur, Rasio Belanja Pendidikan, dan Rasio Belanja Sosial. Belanja modal yang bersifat jangka panjang lebih banyak akan diserap oleh pengusaha besar yang memiliki keahlian dan modal yang tinggi. Hal inilah yang diduga menjadi penyebab naiknya ketimpangan sebagai dampak belanja modal pemerintah.

Belanja modal juga disinyalir menciptakan ruang pilihan aktifitas ekonomi yang beragam serta tatanan kehidupan *urban-like* bagi suatu wilayah sebagaimana Akita dan Miyata (2007) dan Akita (2015) mengatakan bahwa di Indonesia terjadi kesenjangan besar pada wilayah kota. Studi ini didukung pula oleh Akita dan Lukman (2006), Akita dan Miyata (2007), serta Akita dan Miyata (2017). Sebagaimana diketahui kota adalah wilayah yang umumnya memiliki fasilitas publik dan infrastruktur yang lengkap seperti jalur kereta api, jalan, jembatan, dan rumah sakit sebagai bukti adanya belanja modal di wilayah tersebut.

b) Pengaruh rasio belanja bantuan sosial terhadap ketimpangan

Koefisien variabel RBS pada hasil regresi model persamaan sebesar 0,000487 dengan probabilitas sebesar 0,6808. Nilai probabilitas menunjukkan bahwa variabel RBS berpengaruh secara tidak signifikan terhadap variabel ketimpangan. Hasil Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Rutkowski (2009) di Polandia, menggunakan data dana sosial petani. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengeluaran sosial pemerintah tidak mengurangi ketimpangan di Polandia, meskipun yang diharapkan adalah hal sebaliknya.

Akita, Lukman, dan Yamada (1999) juga mengungkapkan dalam penelitiannya bahwa tidak ada hubungan antara pengeluaran/pendapatan rumah tangga dengan ketimpangan. Riau merupakan provinsi dengan pendapatan ketiga tertinggi di Indonesia (setelah Jakarta dan Kaltim), namun memiliki ketimpangan kecil. Sebaliknya, Nusa Tenggara Barat dengan pendapatan rendah, namun memiliki ketimpangan besar.

Fakta ini menunjukkan tambahan penghasilan tidak selalu berbanding lurus dengan berkurangnya ketimpangan.

5) Distribusi Pendapatan dan Pemerataan

Mengatasi ketimpangan tidaklah mudah, meskipun ada yang mempersamakannya dengan kemiskinan sesungguhnya ini adalah dua hal berbeda. Bila kemiskinan dapat diselesaikan dalam tingkat tertentu dengan memberikan bantuan bagi penduduk miskin, di sisi lain kebijakan ini belum tentu menyelesaikan ketimpangan.

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, semua variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan provinsi di Indonesia meskipun secara parsial variabel rasio belanja modal pemerintah kabupaten/kota berpengaruh signifikan terhadap peningkatan ketimpangan provinsi di Indonesia, sedangkan variabel rasio belanja bantuan sosial berpengaruh tidak signifikan terhadap ketimpangan di Indonesia. Kondisi ini menguatkan premis bahwa ketimpangan tidak dapat diselesaikan dengan pengeluaran belanja saja namun tergantung bentuk kebijakan. Hal ini bersesuaian dengan argumen Guiga dan Rejeb (2012) yang mengungkapkan bahwa pertumbuhan sebagai hal penting namun belum cukup mengurangi ketimpangan tanpa ada kebijakan di lapangan. Berkembangnya infrastruktur dengan adanya belanja modal dan naiknya perputaran uang dengan bantuan sosial ini diduga menambah variasi pekerjaan dan efek moral perilaku individu sehingga meningkatkan ketimpangan.

Untuk menjaga agar ketimpangan tidak terlalu besar, pemerintah perlu menyusun kebijakan yang menyelaraskan antara kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi serta kebijakan untuk meningkatkan pemerataan di Indonesia. Pemerintah pusat dan daerah harus cermat dalam memilih paket kebijakan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga agar ketimpangan tidak semakin melebar antar daerah.

6) Kebijakan belanja modal

Setiap tahun belanja modal pemerintah daerah mengalami peningkatan secara nominal, namun apabila dilihat secara rasio, rata-rata tahunan rasio belanja modal

dibandingkan dengan total belanja pemerintah pada tahun 2012-2016 berfluktuasi. Fluktuasi ini berkisar antara 22% sampai 24% dari total belanja daerah.

Berdasarkan hasil penelitian, belanja modal pemerintah daerah terbukti berpengaruh signifikan terhadap peningkatan ketimpangan. Peningkatan ketimpangan ini tidak dapat dihindari mengingat percepatan pembangunan nasional sesuai amanat RPJMN 2015-2019 dengan membangun Indonesia dari pinggiran dan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan memang mengurangi ketimpangan antara desa dan kota, namun mendorong pada pola ketimpangan kota yang selama ini sudah cukup besar (Akita dan Lukman (2006) dan Akita dan Miyata (2007)).

Untuk itu diperlukan sinergi pemerintah pusat dan daerah terkait kebijakan belanja modalnya. Kebijakan pembangunan yang menguatkan kualitas dan keahlian tenaga kerja lokal dapat menjadi solusi mengurangi ketimpangan antar provinsi. Selain itu, pemerintah melalui Kementerian Keuangan dapat menerapkan kebijakan belanja modalnya melalui skema dana desa yang dapat diarahkan kepada belanja modal berorientasi kearifan lokal untuk daerah-daerah yang infrastrukturnya masih belum memadai. Kondisi ini sangat perlu diantisipasi pemerintah ke depan bahwa kita memasuki fase yang menurut Kuznets akan meningkatkan ketimpangan pada tahap awal pembangunan dan diharapkan ketimpangan ini akan menurun di fase berikutnya. Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan akses setiap penduduk pada sektor yang mendorong pembangunan agar dapat mengurangi ketimpangan tersebut.

7) Kebijakan belanja bantuan sosial

Belanja bantuan sosial pemerintah daerah secara nominal mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun apabila melihat secara rasio, rata-rata tahunan rasio belanja bantuan sosial terhadap total belanja pemerintah pada tahun 2012-2016 terus menurun. Pada tahun 2012, rata-rata rasio belanja bantuan sosial sebesar 1,05% serta pada tahun 2016 rata-rata rasio belanja bantuan sosial menurun menjadi sebesar 0,69%.

Berdasarkan hasil penelitian, belanja bantuan sosial tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan. Tidak adanya pengaruh signifikan ini dapat disebabkan oleh nilai belanja bantuan sosial pemerintah daerah yang secara rasio belanja kecil, rata-rata tahunan rasio belanja bantuan sosial pemerintah daerah hanya berkisar antara 0,69%

sampai dengan 1,29% dari total belanja pemerintah daerah. Mungkin di satu sisi, belanja bantuan sosial dari pemerintah kepada masyarakat dapat membantu menambah pendapatan mereka. Namun, Akita et al (1999) menyatakan bahwa pendapatan yang tinggi tidak membawa pengaruh signifikan terhadap ketimpangan, sehingga diduga ketimpangan bukan karena banyak sedikitnya uang dalam perekonomian, namun akses masyarakat. Dalam penelitian ini, tidak ditemukan fakta memadai bahwa memberikan bantuan sosial akan mengurangi ketimpangan, namun diakui bahwa bantuan sosial membantu untuk golongan masyarakat berpenghasilan rendah.

Pertumbuhan (*growth*) dan pemerataan (*equality*) merupakan dua unsur penting dalam proses pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Akan tetapi kenyataan menunjukkan bahwa di antara kedua aspek tersebut seringkali terjadi *trade off* antara satu dan lainnya, yaitu bilamana mendahulukan pemerataan maka akan cenderung memperlambat proses pertumbuhan dan ini sering terjadi dalam kebijakan pemberian bantuan sosial. Namun sesuai dengan peran pemerintah dalam hal stabilisasi, alokasi, dan distribusi, pengeluaran pemerintah daerah dalam mengatasi ketimpangan pembangunan melalui bantuan sosial masih dapat diterima karena mengambil porsi peran distribusi tersebut.

5. SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini mencoba menjelaskan hubungan belanja modal dan bantuan sosial pemerintah daerah terhadap ketimpangan, dengan menggunakan data panel periode tahun 2012 s.d. 2016. Dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan provinsi di Indonesia. Sedangkan secara parsial, variabel rasio belanja modal pemerintah berpengaruh signifikan terhadap peningkatan ketimpangan provinsi di Indonesia, sedangkan variabel rasio belanja bantuan sosial berpengaruh tidak signifikan terhadap ketimpangan di Indonesia.

Dalam model yang digunakan:

- a) Secara parsial variabel rasio belanja modal pemerintah berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan provinsi di Indonesia dengan nilai koefisien positif, dimana adanya kenaikan RBM sebesar 1%, akan menyebabkan kenaikan ketimpangan

sebesar 0,000519%, dengan asumsi tidak ada perubahan pada variabel lain (*ceteris paribus*).

- b) Secara parsial variabel rasio belanja bantuan sosial berpengaruh tidak signifikan terhadap ketimpangan di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meningkatkan penghasilan masyarakat berpenghasilan rendah saja belum tentu menghilangkan ketimpangan itu sendiri.

Dari hasil penelitian yang telah dijelaskan, terdapat beberapa saran, antara lain:

- a) Pemerintah pusat dan daerah harus bersinergi dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga agar ketimpangan tidak semakin melebar antar daerah dengan memanfaatkan kearifan lokal.
- b) Pemerintah melalui Kementerian Keuangan dapat menerapkan kebijakan belanja modalnya melalui skema dana desa yang saat ini sedang berjalan, dimulai dari tahun 2015, yang terus meningkat nilainya hingga saat ini. Kebijakan ini khususnya untuk daerah-daerah yang infrastrukturnya masih belum memadai dengan tetap mengedepankan kualitas dan pengawasan hasil.

Namun demikian, penelitian ini tidak dapat dikatakan bebas dari berbagai keterbatasan. Berikut ini kami sampaikan beberapa keterbatasan tersebut:

1. Dalam penelitian ini, alokasi belanja modal dan belanja bantuan sosial hanya terfokus kepada belanja daerah tingkat kabupaten/kota. Alokasi belanja modal daerah tingkat provinsi dan alokasi belanja modal pemerintah pusat yang jumlahnya lebih besar, tentunya juga memiliki dampak terhadap ketimpangan provinsi. Oleh karena itu pada penelitian selanjutnya dapat dipertimbangkan untuk penggunaan alokasi belanja daerah provinsi.
2. Dalam penelitian, rasio belanja bantuan sosial daerah berperan tidak signifikan terhadap ketimpangan di Indonesia, hal mana terjadi karena nilai rasio belanja bantuan sosial yang terlalu kecil dan secara tren terus menurun. Diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui penyebab tidak signifikannya pengaruh belanja bantuan sosial terhadap ketimpangan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Akita, T., Lukman, R. A., & Yamada, Y. (1999). Inequality in the Distribution of Household in Indonesia: A Theil Decomposition Analysis. *The Developing Economics*, XXXVII(2), 197-221.

- Akita, T., & Lukman, R. A. (1999). Spatial Patterns of Expenditure Inequalities in Indonesia: 1987, 1990 and 1993. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 35(2), 67-90.
- Akita, T., & Miyata, S. (2007). Urbanization, Educational Expansion, and Expenditures Inequality in Indonesia in 1996, 1999, and 2002. *IFPRI Discussion Paper* 00728.
- Alexion, C. (2009). Government Spending and Economic Growth: Econometric Evidence from South Eastern Europe (SEE). *Journal of Economic and Social Research* 11 (1), 1-16.
- Anghiani, K. D., Erfit, E., & Bhakti, A. (2018). Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pembangunan di Wilayah Sumatera. *E-Jurnal Perpektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah* 7(1), 26-34.
- Ariefianto, M. D. (2012). *Ekonometrika: Esensi dan Aplikasi dengan Menggunakan EVIEWS*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Aslichati, L., Prasetyo, H. B., & Irawan, P. (2011). *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka.
- Arsyad, L. (2010). *Ekonomi Pembangunan, Ed. 3*. Yogyakarta: STIE YKPN BPFE.
- Barro, R. J. (2000). Inequality and Growth in a Panel of Countries. *Journal of economic growth*, 5(1), 5-32.
- Benabou, R. (1996). Inequality and growth. *NBER macroeconomics annual*, 11, 11-74.
- Bonet, J. (2006). Fiscal decentralization and regional income disparities: evidence from the Colombian experience. *The Annals of Regional Science*, 40(3), 661-676.
- Chongvilaivan, A., & Kim, J. (2015). Individual Income Inequality and Its Drivers in Indonesia: A Theil Decomposition Reassessment. *Soc Indic Res*, 126, 79-98
- Deininger, K., & Squire, L. (1996). A new data set measuring income inequality. *The World Bank Economic Review*, 10(3), 565-591.
- Dewi, R. (2018). *Analisis Ketimpangan Pembangunan di Provinsi Sulawesi-Selatan Tahun 2010-2016* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).
- Ghali, K. H. (1997). Government Spending and Economic Growth in Saudi Arabia. *Journal of Economic Development*, 22 (2), 165-172.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- _____. (2013). *Analisis Multivariat dan Ekonometrika: Teori, Konsep, dan Aplikasi dengan EvIEWS 8*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gruber, J. (2011). *Public Finance and Public Policy: 3rd edition*. New York: Worth Publishers.
- Guiga, H., & Rejeb, J. B. (2012). Poverty, Growth, and Inequality in Developing Countries. *International Journal of Economics and Financial Issues*. 2, (4), 470-479.
- Gujarati, D. N. (2006). *Dasar-Dasar Ekonometrika: Jilid 1*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- _____. (2006). *Dasar-Dasar Ekonometrika: Jilid 2*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

- Harun, M. (2012). *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pembangunan Wilayah (Studi pada Kabupaten dan Kota di Jawa Timur)*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
- Heryanah. (2017). Kesenjangan Pendapatan di Indonesia: Studi Empiris Berdasarkan SUSENAS 2008, 2011 DAN 2013. *Jurnal BPPK*, 10 (2), 43 – 58.
- Indonesia. Undang-undang No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Ingraham, C. (2018). Diakses dari <https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2018/02/06/how-rising-inequality-hurts-everyone-even-the-rich/> tanggal 19 Juni 2020.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. (2014). *Evaluasi Paruh Waktu RPJMN 2010-2014*. Jakarta. Bappenas
- Kuncoro, M. (2002). *Analisis Spasial dan Regional: Studi Aglomerasi dan Kluster Industri Indonesia*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Kuznets, S. S. (1955). Economic growth and income inequality. *American Economic Review* 45(1), 1-28.
- Miranti, R., Vidyattama, Y., Hansnata, E., Cassells, R., & Duncan, A. (2013). Trends in Poverty and Inequality in Decentralising Indonesia. *OECD Social, Employment and Migration Working Papers No. 148*.
- Musgrave, R. A., & Musgrave, P.B. (2007). *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek Edisi Kelima*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Nachrowi, D. N. (2006). *Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Nurhuda, R., Muluk, M. R. K., & Prasetyo, W. Y. (2013). Analisis Ketimpangan Pembangunan (Studi di Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2011). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 1 (4, Hal), 110-119.
- Pranajaya, E. (2016). *Determinan Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Di Pulau Jawa, Bali Dan Nusa Tenggara*. Skripsi. Repository Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Putra, E. P., Purmadewi, Y. L., & Sahara, S. (2015). Dampak Program Bantuan Sosial terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Kabupaten Tertinggal di Indonesia. *Tataloka*. 17. 161. 10.14710/tataloka.17.3, 161-171.
- Ravallion, M., & Datt, G. (1996). How important to India's poor is the sectoral composition of economic growth? *The World Bank Economic Review*, 10(1), 1-25.
- Rutkowski, A. (2008). Impact of social expenditure on regional disparities in Poland. *Ecfm Country Focus*, 6(3).
- Sabir, Yustika, A. E., Susilo, & Maskie, G. (2015). Local Government Expenditure, Economic Growth and Income Inequality in South Sulawesi Province. *Journal of Applied Economics and Business*, 3, (2), 61-73. (<http://www.aebjournal.org/articles/0302/030205.pdf>) diakses tanggal 3 Februari 2018.
- Sekaran, U. (2006). *Metodologi Penelitian untuk Bisnis: Buku 1*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

- _____. (2006). *Metodologi Penelitian untuk Bisnis: Buku 2*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Sjafrizal. (2012). *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Stichnoth, H., & Van der Straeten, K. (2013). Ethnic diversity, public spending, and individual support for the welfare state: A review of the empirical literature. *Journal of Economic Surveys*, 27(2), 364-389.
- Sugiarto. (2012). *Statistika Ekonomi dan Bisnis*. Tangerang Selatan: Penerbit Universitas Terbuka.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Tim Dosen Ekonometrika. (2015). *Buku Pedoman Praktikum Ekonometrika*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Todaro, M. P. (2000). *Ekonomi Pembangunan Di Dunia Ketiga Edisi 7*. Jakarta : Erlangga.
- United Nations. (2013). *Practical Manual on Transfer Pricing for Developing Countries*. New York: United Nations.
- Wahyuni, H. (2004). Is There A Link Between Increased Growth and Reduced Income Inequality?: Analysis of Cross-Country Studies. *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*, 1(1).
- Wajdi, F. (2011). *Analisis Ketimpangan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan*. Institut Pertanian Bogor.
- Waluyo, J. (2004). Hubungan antara Tingkat Kesenjangan Pendapatan dengan Pertumbuhan Ekonomi: Suatu Studi Lintas Negara. *Economic Journal of Emerging Markets*, 9(1).
- Wibowo, T. (2017). Ketimpangan Pendapatan dan Middle Income Trap. *Kajian Ekonomi dan Keuangan*, 20(2), 111-132.
- Widarjono, A. (2015). *Analisis Multivariat Terapan dengan Program SPSS, AMOS, dan SMARTPLS*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Wooldridge, J. M. (2001). *Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data*. London: The MIT Press.
- Yusuf, A. A., Sumner, A., & Rum, I. A. (2013). *Twenty Years of Expenditure Inequality In Indonesia, 1993–2013*. Center for Economics and Development Studies, Department of Economics, Padjadjaran University.